

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab merupakan bentuk pemenuhan (*compliance*) Indonesia dan PEA, sebagai Negara Pihak dari UNCAC. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab belum maksimal dalam menginterpretasikan ketentuan bantuan hukum timbal balik dalam UNCAC secara normatif (positivistik). Penulis menemukan bahwa:

1. Secara umum Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah mencakup ketentuan-ketentuan bantuan hukum timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) s/d (30) dari UNCAC.
2. Ketentuan UNCAC, sebagai instrumen global dalam menanggulangi korupsi dimaksudkan untuk berlaku secara umum. Secara khusus, bantuan diberikan terhadap kejahatan-kejahatan korupsi yang diatur oleh konvensi (Pasal 15 s/d 25 UNCAC). UNCAC pun mengatur ruang lingkup bantuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (3) huruf *j* dan *k*, sejalan dengan fitur konvensi yang diatur dalam Bab V konvensi. Fitur *asset recovery* tidak secara normatif diatur dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan PEA.

3. Perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Indonesia dan PEA, perjanjian tersebut mengatur bahwa bantuan dapat diberikan terhadap tindak pidana apa pun pada saat permintaan diajukan. Perjanjian ini tidak mengatur pemberian bantuan yang secara eksplisit diberikan terhadap tindak pidana korupsi. Walaupun demikian, perjanjian tersebut memberikan penekanan terhadap kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan perpajakan, masalah bea cukai, transfer valuta asing dan masalah pendapatan lainnya. Jika dilihat dari ruang lingkup perjanjian, perjanjian ini merupakan perjanjian bilateral yang hanya berlaku di antara para pihak (Indonesia dan PEA). Dengan demikian, perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak saja.

Terdapat modifikasi dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik antar kedua negara. Namun demikian, modifikasi yang ada dalam perjanjian tersebut harapannya tetap bisa mencapai tujuan dari UNCAC, terutama dalam melakukan kerja sama internasional untuk menanggulangi kejahatan korupsi.

B. Saran

Dalam melakukan kerja sama penegakan hukum, terutama bantuan hukum timbal balik, otoritas Indonesia haruslah melihat secara luas, instrumen hukum apa saja yang berlaku antara Indonesia dan PEA dalam hal bantuan hukum timbal balik. Hal tersebut dimaksudkan agar bantuan dapat dimintakan secara efektif, dengan melihat karakter kejahatan dan/ atau tindak pidana, yang pada saat tersebut

dimintakan bantuan. Komunikasi informal yang dilakukan sebelum permintaan diajukan pun dapat secara signifikan membantu kelancaran permintaan bantuan.

UNCAC memiliki pengaturan yang lebih komprehensif dalam hal *asset recovery*. Dalam hal *asset recovery*, sepanjang para pihak menyepakati, Indonesia dan PEA dapat menggunakan ketentuan bantuan yang berhubungan dengan pemulihan aset, sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) huruf *j* dan *k*. Kerja sama dan koordinasi antar lembaga dapat mendukung efektivitas perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan PEA, dan mekanisme MLA yang ada dalam UNCAC. Kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri diperlukan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait bantuan yang dimintakan atau permintaan bantuan yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ADB dan OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, 2007, *"Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and Pasific"* <https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/37900503.pdf> diakses pada 17 Januari 2019
- Akehurst, Michael 1984, *"A Modern Introduction to International Law"* Fifth Edition, London; Butler & Tanner Ltd.
- Bowett, D.W., 1982, *"The Law of International Institution"*, Fourth Edition, London: Stevens & Sons
- Carey, Peter, et al, 2017, "Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendels (1808-1811) sampai Reformasi", Depok: Komunitas Bambu
- Hadiz, Vedi R., 2004, *"The State of Corruption: Indonesia" on Vinay Bhargava and Emil Bolongaita. "Challenging Corruption in Asia: Case Studies and a Framework for Action."*, Washington, D.C; The World Bank
- Hatchard, John, 2010, *"Adopting A Human Rights Approach Towards Combating Corruption"*, Martina Boersma and Hans Nelen (Eds). *"Corruption & Human Rights: Interdisciplinary Perspectives"*, Antwerp: Intersentia Maastricht Centre for Human Rights
- Istanto, F. Sugeng 2010, "Hukum Internasional", Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Oppenheim, L., 1955, *"International Law: A Treatise"* Vol. I : Peace. 8th edition; ed. by H. Lauterpacht., London: Longmans
- Parthiana, I Wayan 2002, "Hukum Perjanjian Internasional", Bagian 1, Bandung: Penerbit Mandar Maju
- _____, 2009, "Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern", Bandung; Yrama Widya
- Pratomo, Eddy 2016, "Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis terhadap Politik Hukum Indonesia", Jakarta: Elex Media Komputindo

Priyono, B. Herry dan Andi Tarigan (ed.), 2018, "Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Shaw, Malcolm N., 2003, "*International Law*" *Fifth Edition*, Cambridge, UK, Cambridge University Press

Siahaan, N.H.T, 2008, "Money Laundering dan Kejahatan Perbankan", Jakarta; Penerbit Jala

Sjahputra, Iman, 2013, "Teori dan Kasus Money Laundering (Pencucian Uang)", Jakarta: Harvarindo

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2007, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suryokusumo, Sumaryo, 2010, "Hukum Pidana Internasional", Jakarta: Tatanusa

_____, 2015, "Hukum Organisasi Internasional", Jakarta: Tatanusa

Starke, J.G., 1989, "Introduction to International Law" Tenth Edition, London; Butterworths

JURNAL/ ARTIKEL

Andersson, S., & Heywood, P. M., 2009, "The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency International's Approach to Measuring Corruption" *Political Studies* 57(4), 746–767. hal 748 <https://doi.org/10.1111%2Fj.1467-9248.2008.00758.x> diakses pada 24 Mei 2019

Arifin, Ridwan, 2016, "Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Covention Against Corruption* (UNCAC) dan *Asean Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT)", *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 3, Nomr 1, Maret 2016, hal.37-55 <https://media.neliti.com/media/publications/123143-ID-none.pdf> diakses pada 4 Maret 2019

Chaikin D., Sharman J.C., 2009, "Best Practice for International Cooperation. In: *Corruption and Money Laundering. Palgrave Series on Asian Governance*" Palgrave Macmillan, New York, https://doi.org/10.1057/9780230622456_6 diakses pada 17 Januari 2019

- Evans, A. E., & Shearer, I. A., 1973, "*Extradition in International Law*", *The American Journal of International Law*, 67(3), 600 <https://doi.org/10.2307/2199177> diakses pada 30 Mei 2019
- Hechler, H, et al., 2019, "*UNCAC in a nutshell 2019. A quick guide to the United Nations Convention against Corruption for donor agency and embassy staff*", editor Jessica Schultz, U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Mischelsen Institute: Norway <https://www.u4.no/publications/uncac-in-a-nutshell-2019.pdf> diakses pada 6 Juni 2019
- Johnson, Stephen. "Corruption is Costing the Global Economy \$3.6 billion dollars Every Years", 13 Desember 2018, <https://www.weforum.org/agenda/2018/12/the-global-economy-loses-3-6-trillion-to-corruption-each-year-says-u-n/> diakses pada 17 Januari 2019
- Juwana, Hikmahanto et. al, "*Law and Practice of Asset Recovery in Indonesia: Challenges and Opportunities*", *Jurnal Opinio Juris* Vol.11 No.01 Mei-Agustus 2012
- Juwita, Ratna, 2016, "*Democracy and Anti-Corruption Strategy: The Role of Civil Society in Preventing and Combating Corruption in Indonesia*", *Pacific Fraud Journal* Vol 2. No.02 (2016) hal. 165-176, <http://dx.doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.14> diakses pada 21 Januari 2019
- _____. 2017, "*Corruption as a violation of the right to education in Indonesia: A Constructive Approach*" *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 47 No. 3 (2017): 350-376 <http://dx.doi.org/10.21143/.vol47.no3.1582>
- Prasasthi, Svetlana A, "Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Bantuan Hukum Timbal Balik untuk Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance-MLA*) terhadap Pengembalian Aset di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi (*Stolen Asset Recovery*)" *Jurnal Opinio Juris* Volume 2, Mei-Agustus 2011
- Prost, Kimberly, 2006, "*Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance*", dalam ADB/ OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific, "*Denying Safe Haven to The Corrupt and The Proceeds of Corruption*" Manila: Asian Development Bank <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28023/denying-safe-haven.pdf> diakses pada 25 Mei 2019
- Stephenson, Kevin M. et al., 2011, "Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations for Action",

Washington: World Bank
<https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Barriers%20to%20Asset%20Recovery.pdf> diakses pada 3 Mei 2019

Suprandio, Giri, 2012, *"Developing International Cooperation: A Need for Expediting Mutual Legal Assistance"*, Jurnal Opinio Juris Vol 11.No.01 Mei-Agustus 2012

SKRIPSI/ TESIS

Arifin, Ridwan, 2015, *"The Implementation of Mutual Legal Assistance in The Context of Assets Recovery Between Indonesia and Singapore"*, Tesis, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Hermanto, T. Jessica Novia, 2016, "Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam *United Nations Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan Implementasinya di Indonesia." Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung: Bandar Lampung

Listya, Anindita Kusuma, 2014, *"United Nations Convention Against Corruption dan Kerja sama Mutual Legal Assistance on Asset Recovery"*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok

LAPORAN

Arvis, Jean F. dan Ronald E. Berenbeim, 2003, *"Fighting Corruption in East Asia: Solution from the Private Sector"* (Washington D.C; The World Bank)

Bertelsmann Stiftung, 2018, *"BTI Indonesia Country Report"*, <https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/IDN/> diakses pada 18 Januari 2019

_____. 2018. "2018 Globalization Report", https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikation/en/MT_Globalization_Report_2018.pdf diakses pada 18 Januari 2019

- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, “Laporan Tahunan 2017: Transparansi Membangun Negeri ‘Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Kepentingan Pajak’”
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/DJP%20AR-2017%20Fullpages%20-%20Indonesia%20%28Lowres-Compressed%29.pdf> diakses pada 4 Maret 2019
- Dell, Gillian and Andrew McDevitt, 2018, “*Exporting Corruption: Progress Report 2018: Assessing enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention*”
https://transparency.org.au/tia/wp-content/uploads/2018/09/TI_2018_Report_ExportingCorruption_English.pdf diakses pada 17 Januari 2019
- Global Legal Insights. 2019. “*Bribery & Corruption 2019: Brazil*”,
<https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/brazil> diakses pada 18 Januari 2019
- Indonesia Corruption Watch, 2018, “Laporan Akhir Tahun 2017”,
https://antikorupsi.org/sites/default/files/annual_report_icw_2017.pdf diakses pada 17 Januari 2019
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, “Laporan Akhir Tahun 2017”,
<https://www.kpk.go.id/nuweb/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202017.pdf> diakses pada 27 Februari 2019
- Merkle, Ortun. “*Overview of Corruption and Anti-Corruption: Indonesia*”
 18 Oktober 2018, Transparency International Anti-Corruption Helpdesk
 Answer,
<https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/indonesia-overview-of-corruption-and-anti-corruption> diakses pada 18 Januari 2019
- OECD, 2017, “*Brazil: Follow-Up to The Phase 3 report & Recommendations*”,
<https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Brazil-Phase-3-Written-Follow-Up-Report-ENG.pdf>
 diakses pada 18 Januari 2019
- The World Bank, “*Corruption Control Index*”,
https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hc153e067?country=IDN&indicator=364&viz=line_chart&years=2012,2017
 diakses pada 18 Januari 2019
- Thompson, Joseph, 8 November 2018, “*How Banking with blockchain can stamp out corruption and increase financial inclusion*”,
<https://www.weforum.org/agenda/2018/11/banking->

[blockchain-stamp-out-corruption-increase-financial-inclusion](#)
diakses pada 17 Januari 2019

Transparency International, “*Corruption Perception Index 2018*”, 29 Januari 2019, <https://www.transparency.org/cpi2018> diakses pada 26 Februari 2019

_____, “*Corruption Perception Index 2012*” 2 Desember 2012 <https://www.transparency.org/cpi2012> diakses pada 18 Januari 2019

_____, “*Corruption Perception Index 2018: Short Methodology Note*”, 29 Januari 2019, <https://www.transparency.org/cpi2018#methodology> diakses pada 26 Februari 2019

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia

dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357)

SURAT KABAR

Yuntho, Emerson, “Memburu Aset Koruptor”, *Kompas*, 25 Februari 2019

INTERNET

Gallas, Daniel, “Brazil’s Odebrecht corruption scandal” *BBC News* 7 Maret 2017 <https://www.bbc.com/news/business-39194395> diakses pada 18 Januari 2019

Guarascio, Francesco 6 Maret 2019, “*EU to broaden tax haven blacklist, weighs UAE, Bermuda listing*” <https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-blacklist/eu-to-broaden-tax-haven-blacklist-weighs-uae-bermuda-listing-idUSKCN1QM28Q> diakses pada 25 April 2019
<http://www.track.unodc.org/Academia/Pages/Topics/MLA.aspx> diakses pada 21 Januari 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses pada 25 Februari 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis> diakses pada 25 Februari 2019

<https://kemlu.go.id/abudhabi/id/read/persatuan-emirat-arab/2306/etc-menu> diakses pada 28 Mei 2019

<https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/stronger-ties-president-has-been-busy-working-bilateral-relationships-1> diakses pada 28 Mei 2019

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&lang=en#EndDec diakses pada 6 Juni 2019

https://treaties.un.org/PAGES/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&clang=en diakses pada 29 Mei 2019

[https://www.cifor.org/ilea/ref/ina/instruments/Law Enforcement/MLA/index.htm](https://www.cifor.org/ilea/ref/ina/instruments/Law%20Enforcement/MLA/index.htm) diakses pada 21 Januari 2019

[https://www.mofa.gov.ae/EN/DiplomaticMissions/Embassies/Jakarta/About Embassy/Pages/BilateralRelations.aspx](https://www.mofa.gov.ae/EN/DiplomaticMissions/Embassies/Jakarta/AboutEmbassy/Pages/BilateralRelations.aspx) diakses pada 29 Mei 2019

- <https://www.stepto.com/images/content/1/6/v1/1600/2599.pdf> diakses 22 Mei 2019
- Kahleej Times, 18 Agustus 2019, “70 Years Republic of Indonesia: Strong Partners with Growing UAE”
<https://www.khaleejtimes.com/indonesia-independence-day/70-years-republic-of-indonesia-strong-partners-with-growing-uae> diakses pada 28 Mei 2019
- Pressly, Linda, “*The Largest Foreign Bribery Case in History*” BBC World Service 22 April 2018 <https://www.bbc.com/news/business-43825294> diakses pada 18 Januari 2019
- Rakhmat, Muhamad Zulfikar, 18 Mei 2017, “UAE-ASEAN Relations: Beyond “Emirates” Diplomacy?” dalam <http://asc.fisipol.ugm.ac.id/2017/05/18/uae-asean-relations-beyond-emirates-diplomacy/> diakses pada 28 Mei 2019
- Septiari, Dian, 4 Desember 2018, *The Jakarta Post*, “UAE Hails Growing Ties with RI as Extradition Treaty Endorsed”
<https://www.thejakartapost.com/news/2018/12/04/uae-hails-growing-ties-with-ri-extradition-treaty-endorsed.html> diakses pada 28 Mei 2019
- Tehusijarana, Karina M, 17 Februari 2019, “MLA deals no guarantee of asset recovery: Observers”, *The Jakarta Post*,
<https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/17/mla-deals-no-guarantee-of-asset-recovery-says-observers.html> diakses pada 1 Maret 2019
- UN News. “*The Cost of Corruption: values, economic development under assault, trillions lost, says Gutierrez*”, 9 Desember 2018, <https://news.un.org/en/story/2018/12/1027971> diakses pada 18 Januari 2019
- Watts, Jonathan. “*Operation Car Wash: Is this the biggest corruption scandal in history?*” *The Guardian*, 1 Juni 2017, <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-history> diakses pada 18 Januari 2019
- Winarta, Frans H., *The Jakarta Post*, 26 Maret 2019, “MLA is No Quick Fix In Asset Recovery”
<https://www.thejakartapost.com/academia/2019/03/26/mla-is-no-quick-fix-in-asset-recovery.html> diakses pada 26 April 2019

DOKUMEN PBB

- United Nations Development Programme, 2008, “*Tackling Corruption, Transforming Life*”, New Delhi; Macmillian India Ltd.

_____, 2016, “*Asia-Pacific Human Development Report 2016: How Changing Demographics Can Power Human Development*”, Bangladesh; Printcraft Company Limited

_____, “UNCAC: linkin it in: What have the SDGs to do with the Review Process?”, [https://www.unodc.org/documents/NGO/UNCAC_and Sustainable Development Goals UNDP.pdf](https://www.unodc.org/documents/NGO/UNCAC_and_Sustainable_Development_Goals_UNDP.pdf) diakses pada 18 Januari 2019

UNDP, UNODC, 2016, “*Criminalization and Law Enforcement: The Pacific’s Implementation of Chapter III of The UN Convention against Corruption*” [https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/Pacifics Implementation of UNCAC Chapter III.pdf](https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/Pacifics_Implementation_of_UNCAC_Chapter_III.pdf) diakses pada 13 Mei 2019

United Nations General Assembly, “*Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development*”, 21 October 2015, A/RES/70/1, http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf diakses pada 18 Januari 2019

_____, “*United Nations Convention against Corruption: Resolution adopted by the General Assembly*” 21 November 2003, A/RES/58/4 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/4 diakses pada 18 Januari 2019

United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, “*Legislative Guide for Implementation of The United Nations Convention against Corruption*”, New York; United Nations [https://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC LegislativeGuide.pdf](https://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf) diakses pada 29 Mei 2019

_____, 2009, “*Technical Guide to The United Nations Conventions Against Corruption*”, New York: United Nations [https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical Guide UNCAC.pdf](https://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf) diakses pada 27 Mei 2019

_____, 2010, “*The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assesment*”,

http://www.unodc.org/res/cld/bibliography/the-globalization-of-crime-a-transnational-organized-crime-threat-assessment.html/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf diakses pada 17 Januari 2019

_____. 2010, *“Travaux Préparatoires of the Negotiation for Elaboration of the United Nations Convention against Corruption”*, New York: United Nations <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Travaux/Travaux Préparatoires - UNCAC E.pdf> diakses pada 30 Mei 2019

_____. 2012, *“Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition”*, New York; United Nations <https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual Legal Assistance Ebook E.pdf> diakses pada 24 Februari 2019

_____. 2017, *“State of Implementation of The United Nations Convention against Corruption: Criminalization, Law Enforcement and International Cooperation” Second Edition*, Vienna: United Nations https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf diakses pada 30 Mei 2019

_____. 2018, *“Signature and Ratification Status.”* <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html> diakses pada 17 Januari 2019

_____. 2018, *“Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption 25 April 2018 CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add. 7,”* <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries2/V1802700e.pdf> diakses pada 18 Januari 2019

United Nations, 2004, *Foreword*. Kofi A. Annan, *“United Nations Convention Against Corruption”*, New York: United Nations, https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf diakses pada 27 Februari 2019

_____. 2018, *“Conference of the State Parties to the United Nations Convention against Corruption 25 April 2018 CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.7,”* <http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGr>

[oups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries2/V1802700e.pdf](#) diakses pada 18 Januari 2019

_____, “*Statute of the International Court of Justice*”, 18 April 1946, <https://www.icj-cij.org/en/statute> diakses pada 27 Februari 2019

_____, “*Vienna Convention on the Law of Treaties*”, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331, <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf> diakses pada 27 Februari 2019

LAIN-LAIN

European Parlement, *Briefing*, “List of Tax Havens by EU” <http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147404/7%20-%202001%20EPRS-Briefing-621872-Listing-tax-havens-by-the-EU-FINAL.PDF> diakses pada 25 April 2019

Hiariej, Edward O.S, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, “Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi” Balai Senat Universitas Gadjah Mada, 30 Januari 2012 <https://repository.ugm.ac.id/digitasi/download.php?file=2831pp120200001.pdf> diakses pada 3 Mei 2019

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab” https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ri-uea_mla.pdf diakses pada 22 April 2019

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011, “Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional Termasuk Penyiapan *Full Powers* dan *Credentials*”. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial-Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Minutes of Meeting of the Second Round of Negotiations Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates On Mutual Legal Assistance and Extradition Treaty, Nusa Dua, Bali, 26-28 Juni 2012

Official Journal of European Union, 2018, “EU List of Non-Cooperative Jurisdiction for Tax Purposes” dalam [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0126\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0126(01)&from=EN) diakses pada 25 April 2019

Pedoman Delegasi Republik Indonesia, “Kegiatan Pertemuan ke-2 antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab tentang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana” Nusa Dua, Bali, 25-28 Juni 2012

West's Encyclopedia of American Law, 2008, edition 2, The Gale Group, Inc. <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/White-collar+criminal> diakses pada 15 Januari 2019

Wawancara dengan Andi Geman Sinaga, Kepala Seksi Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 7 Mei 2019

Wawancara dengan Kepala Seksi Kerja Sama Bantuan Hukum Timbal Balik, Subdirektorat Politik, dan Kerja Sama Penegakan Hukum, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Yogyakarta, 24 April 2019